

# Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi

Renya Rosari<sup>1\*</sup>, Pandu Adi Cakranegara<sup>2</sup>, Ratih Pratiwi<sup>3</sup>, Irsyad Kamal<sup>4</sup> Chitra Indah Sari<sup>5</sup>

Universitas Kristen Artha<sup>1</sup>, Universitas President, Cikarang<sup>2</sup>, Universitas Wahid Hasyim, Semarang<sup>3</sup>, Universitas Padjadjaran, Bandung<sup>4</sup>, IAIN Batusangkar Sumatera Barat<sup>5</sup>  
[123ny4@gmail.com](mailto:123ny4@gmail.com), [pandu.cakranegara@president.ac.id](mailto:pandu.cakranegara@president.ac.id), [rara@unwahas.ac.id](mailto:rara@unwahas.ac.id),  
[irsyad.kamal1191@gmail.com](mailto:irsyad.kamal1191@gmail.com), [Chitraindahsari@iainbatusangkar.ac.id](mailto:Chitraindahsari@iainbatusangkar.ac.id)

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 29 April 2022

Disetujui : 14 Mei 2022

Dipublikasi : 4 Juli 2022

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze human resource management strategies in digitally managing BUMDes finances. The demand for the use of digitization must indeed be implemented to make it easier in the world of work. Digitalized financial reports can make it easier for BUMDes business owners to obtain information and data that is systematically arranged. This research method uses a qualitative method with a literature review approach. The data sources are taken from references to the Village Government Law, relevant research journals and books on village financial management. Data analysis using document analysis. The findings of this study are; BUMdes managers must be able to manage archives based on internationalization; BUMDes managers must be integrated in preparing financial SOPs; The BUMDes manager compiles correct digitizing accounting reports and administrative records so that they can provide management accountability in the use of capital participation funds that have been rolled out by the government.*

**Keyword:** *Human Resource Management Strategy; Financial Management; BUMDES and the Digitalization Era*

## ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes secara digital. Tuntutan penggunaan digitalisasi memang harus diterapkan untuk mempermudah dalam dunia kerja. Laporan keuangan secara digitalisasi dapat memberikan kemudahan para pemilik usaha BUMDes dalam memperoleh informasi serta data yang tersusun secara sistematis. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Sumber data yang diambil dari referensi Undang-Undang Pemerintahan desa, jurnal penelitian yang relevan dan buku tentang pengelolaan keuangan desa. Analisis data menggunakan analisis dokumen. Hasil temuan penelitian ini adalah; pengelola BUMdes harus mampu mengelola arsip dengan berbasis internesisasi; pengelola BUMDes harus berintegrasi dalam menyusun SOP keuangan; Pengelola BUMDes menyusun laporan pembukuan dan pencatatan administrasi secara digitalisasi yang benar sehingga bisa memberikan pertanggungjawaban pengurus dalam penggunaan dana penyertaan modal yang telah digulirkan pemerintah.

**Keywords:** *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengelolaan Keuangan; BUMDES dan Era Digitalisasi*



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini membawa perubahan drastis cepat dengan memasuki era digital dari konvensional/analog menjadi bentuk digital. Digitalisasi informasi merupakan proses transformasi berbagai informasi dari format analog menjadi format digital, sehingga mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola dan didistribusikan kembali kepada pengguna informasi untuk berbagai keperluan dan dasar pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi pada perusahaan merupakan salah satu contoh transformasi digitalisasi informasi, informasi dikelola dengan menggunakan bantuan komputer, baik *hardware* maupun *software*. yang digunakan pada suatu perusahaan. Sistem informasi memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan secara efektif (Miftah & Febri Sukmawati, 2020).

Kehadiran Teknologi Komunikasi Digital dewasa ini sudah membuat inovasi besar di sektor promosi produk maupun layanan Teknologi Informasi (IT) terbukti dapat melakukan fungsi pemasaran dengan efektif dan efisien serta memiliki jangkauan yang luas serta mampu memfasilitasi berbagai konten termasuk narasi, ilustrasi, serta video yang murah dan interaktif (Fitriansyah & Nuryakin, 2021). Studi manajemen telah mengakui transformasi digitalisasi yaitu, "proses teknis mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital" sebagai salah satu fenomena yang paling relevan membentuk evolusi dunia bisnis (Bergamaschi et al., 2021).

Hasil penelitian Gilster dkk (Fitriansyah & Nuryakin, 2021) meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan (*skill*) dengan menggunakan keuangan maupun digital, serta aspek nonkognitif berupa motivasi, kepercayaan, dan aktivitas. Sependapat dengan hasil penelitian Rita & Utomo dalam (Adella & Rio, 2021) kinerja keuangan adalah suatu kegiatan operasional dan investasi perusahaan dengan meningkatkan peran perantara keuangan, seperti angel investor, investor ventura dan kreditor yang dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan inovasi pasar produk.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah digitalisasi. Teknologi Digital merupakan peralihan dari operasional yang tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan komputer. Pesatnya perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, dengan sendirinya telah memacu terjadinya perkembangan disektor media masa, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi (Purnama, 2022).

Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mengembangkan teknik agar manusia dapat dengan efektif mengolaborasi berbagai aktivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Peran utama manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat dipilih SDM yang berkualitas bagi organisasi (Wildanu, 2019).

Kualitas sumber daya manusia dalam hal itu perangkat desa dapat mendorong mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban yang lebih terukur dalam proses mengelola dana desa dari proses awal sampai akhir setelah dikururkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Menurut Riawan (Harahap et al., 2020) bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pelaksanaan pembangunan meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat.

Ketidakefektifan pengelolaan BUMDes juga terjadi di daerah lain. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Manikam, 2020 menunjukkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa di Gunungkidul belum berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi, serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDes tersebut (Iryani et al., 2020).



Laporan keuangan akuntansi secara digitalisasi dapat memberikan kemudahan para pemilik usaha UMKM dalam memperoleh informasi serta data yang tersusun secara sistematis. Terdapat beberapa keuntungan para pemilik usaha UMKM jika dapat menyajikan serta menyediakan laporan keuangan. Salah satu keutamaannya adalah para pengusaha dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Dalam menyajikan laporan keuangan tersebut dapat membantu para pemilik UMKM untuk dapat melakukan pengambilan keputusan dalam mengembangkan usahanya dengan dasar pada kondisi konkret (Ajengtiyas & Mashuri, 2020).

Digitalisasi *marketing* dengan teknologi digital dalam pengembangan entitas bisnis skala makro yang berada di pedesaan yang dibentuk dengan nama Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa (BUMDes) dengan membentuk tiga dasar diantaranya; (a) kelembagaan dan bisnis, BUMDes mempunyai legalitas badan hukum didirikan dalam mendirikan unit usaha berbasis potensi desa, melalui pencocokan usaha dengan potensi desa agar mampu menjadi penggerak perekonomian di Desa; (b) mempunyai akses keuangan, optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui ketersediaan akses keuangan di BUMDes; (c) digitalisasi selain berfungsi sebagai *Offtaker* terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga memfasilitasi masyarakat desa untuk mengakses pasar melalui *platform market place* yang dikembangkan melalui ekosistem BUMDes online (Sanjaya et al., 2020).

Dalam ilmu ekonomi dan bisnis terdapat istilah siklus Hidup. Konsep tersebut membagi kondisi produk atau entitas usaha ke dalam beberapa siklus. Teori ini juga berlaku untuk BUMDes Berdikari, dimana BUMDes melalui beberapa tahapan sebelum mencapai tahap kedewasaan. Persoalan yang muncul, banyak BUMDes mengalami kesulitan bahkan untuk bertahan pada setiap tahapannya. Oleh karena itu diperlukan pengembangan kompetensi pengelola BUMDes sebagai *key instrument* di BUMDes itu sendiri, baik oleh internal sendiri maupun berkolaborasi dengan mitra untuk mempersiapkan *toward upgrade* (Sanjaya et al., 2020)

Tantangan BUMDes masih rendahnya kinerja dalam pembangunan ekonomi dan terlihat dari banyaknya kekurangan dalam proses pelaksanaannya serta basis unit usaha yang belum optimal. Selain itu, permasalahan produktivitas masyarakat yang rendah dengan minimnya produk olahan dan usaha yang dilakukan menjadikan peran BUMDes tidak fokus pada masyarakat. Tantangan lainnya yaitu ancaman organisasi yang memiliki ciri khas tersendiri dalam melakukan kegiatan usaha (Ridwansyah et al., 2021).

BUMDes dengan fasilitas digital di era teknologi dewasa ini Jika dilihat dari kaca mata stakeholder, BUMDes terdiri dari empat aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan kelembagaan (Pujiana, dkk., 2019). Implementasi program BUMDes sangat berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan kesejahteraan dengan pengembangan usaha kecil masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (Pujiana, dkk., 2019).

Permasalahan baru yang muncul ketika berbicara tentang teknologi adalah kemampuan dari pengelola BUMDes yang belum memiliki kompetensi untuk mengurus program BUMDes yang modern. Pemberdayaan pengelolaan BUMDes dalam pemanfaatan teknologi digital marketing tentunya harus dijalankan oleh orang yang profesional dalam bidang IT, sehingga pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan aparat desa dalam manajemen pengelolaan BUMDes. Berdasarkan dari latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes dan implikasi pengelolaan dana secara digital pada peningkatan SDM BUMDes

## STUDI LITERATUR

### Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Nisjarn (Rafael et al., 2018) menyebutkan bahwa pemberdayaan SDM dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang (pemberian wewenang, sehingga di harapkan SDM lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, etos kerja tinggi yang pada akhirnya produktivitas organisasi menjadi meningkat. Menurut Wheelen dan Hunger (Pramudia et al., 2016)



“Manajemen sumber daya manusia strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian) MSDM. Priyo menjelaskan bahwa: “strategik manajemen sumber daya manusia merupakan komponen penting dari strategi korporasi yang membahas proses keterkaitan teknikal manajemen sumber daya manusia dengan strategi bisnis”. Strategik manajemen sumber daya manusia menciptakan suatu proses penuangan dari konsep strategi bisnis ke kemampuan organisasi untuk menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan bisnis (Rifai et al., 2020).

### **Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, untuk itu ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat, karena itu perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), masyarakat perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan. Kedua, dalam sektor pemerintahan, keuangan desa seyogyanya tidak semata dialokasikan untuk gaji pamong, tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pamong desa. Ketiga, bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup. Sebagai contoh adalah pembinaan muda-mudi dan juga penanganan kenakalan remaja (Sari, 2020).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD) dalam hal ini adalah Sekretaris Desa sebagai Koordinator, Kepala Seksi, dan Bendahara (Sumiyati & Ichi, 2019). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Carter, Burritt, & Pisaniello (et al., 2018) yang membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dana desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan efektivitas program pembangunan desa. Pengelolaan dana desa diharapkan bisa berjalan secara efektif, yang ditunjukkan dengan hasil pembangunan yang lebih merata di berbagai desa. Pembangunan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Sesuai dengan pendapat Hermann, M., Pentek, T., & Otto (Lakoro et al., 2021), ada empat model manajemen keuangan berbasis digital berdasarkan revolusi industri 4.0. Pertama, interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP).

### **Konsep BUMDes**

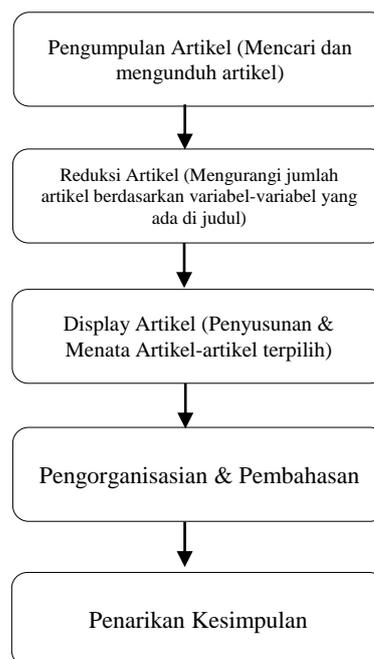
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) (Rafael et al., 2018). BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai



dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa (Giri et al., 2017). Menurut Wijaya (Ely Triyo, Haryono, 2020) BUMDes merupakan strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. BUMDes juga salah satu strategi kebijakan meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia di desa dan bentuk kemandirian ekonomi desa yang mampu menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa (Ely Triyo, Haryono, 2020).

### METODE

Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka dengan menganalisis beberapa kebijakan peraturan Desa, Undang-Undang Desa dan menganalisis artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional dan Internasional sebagai metode penelitian agar terlaksananya penelitian yang dimaksud. Tahapan-tahapan yang digunakan pada kajian literatur dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut;



**Gambar 1.** Langkah-langkah kajian literatur (Marzali, 2016)

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan literatur. Studi literatur yang dilakukan dengan mencari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, serta dokumen-dokumen yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan bumdes digitalisasi.

## HASIL

### Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes Digitalisasi

Pelaksanaan kegiatan pemahaman tentang digitalisasi pada BUMDes dengan strategi sosialisasi akan pentingnya penggunaan sistem digital. Pelaksanaan sosialisasi lebih banyak berlangsung melalui diskusi keinginan dari pengelola BUMDes agar dapat menjadi semakin lebih baik kedepannya dalam hal tata kelola, pemasaran, maupun kontribusi nyata dalam proses pembangunan desasetempat. Salah satu hal penting dan memerlukan perhatian yang cukup serius ialah teknologi informasi karena dewasa ini, perkembangan dunia dipengaruhi oleh teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi pun memberikan perubahan yang signifikan terhadap arah dan laju kehidupan manusia (Zukhri et al., 2007). Sesuai penelitian (Ridwansyah et al., 2021) memperkuat BUMDes dan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas digital di era teknologi dewasa ini. Jika dilihat dari kaca mata stakeholder, BUMDes terdiri dari empat aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan kelembagaan. Implementasi program BUMDes sangat berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan kesejahteraan dengan pengembangan usaha kecil masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Strategi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia di BUMDes perlunya komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes. Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi. Selain suntikan dana dari pemerintah harus memberikan fasilitas pendukung untuk pengelolaan BUMDes. Setiap Desa harus diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.

Strategi BUMDes dalam peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan diantaranya; (a) memberikan sosialisasi tentang aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan yang dapat digunakan oleh anggota BUMDes, dengan sosialisasi bersama kepada pengelola Desa, Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat dapat meningkatkan ekonomi perdesaan untuk dapat tertarik pihak swasta berkolaborasi, (b) merekrut dan memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan agar bisa bermanfaat dan efisiensi dalam penggunaan dana, (c) menambah anggaran untuk kedepannya. Untuk meningkatkan agar pelaksanaan Digitalisasi BUMDes, pemerintah menambahkan anggaran untuk keperluan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya program Digitalisasi BUMDes.

Pengembangan SDM sangat penting searah dengan pengembangan perusahaan. Konsep pembentukan dan pendirian BUMDes menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa, pada dasarnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengembangkan SDM Pengelola BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena apa yang direncanakan dan dilakukan BUMDes, sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Terbuka, 2020).

Selain itu strategi dalam upaya peningkatan SDM pentingnya melibatkan tenaga pendamping profesional yang bertugas mendampingi Desa khususnya dalam Pengembangan BUMDes yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nampaknya tidak berjalan maksimal. Berdasarkan keterangan para informan yang berhasil dihimpun oleh Penulis dalam penelitian ini menunjukkan tidak intensifnya para tenaga pendamping profesional dalam bekerja membantu desa, karena mereka tidak berdomisili di desa yang didampinginya.

Menurut Noe (Harini et al., 2015) sumberdaya manusia merupakan faktor penting keberhasilan usaha. Maju mundurnya usaha sangat dipengaruhi oleh kualitas SDMnya. Teknologi atau mesin yang modern, modal yang kuat, dan kegiatan pemasaran yang tepat merupakan hasil kerja SDM yang berkualitas. Hal ini menunjukkan arti penting peningkatan kualitas SDM dalam organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing.

### **Implikasi Pengelolaan Dana Secara Digital pada Peningkatan Sumber Daya Manusia BUMDes**

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka pengelola BUMDes dapat melakukan pemasaran secara lebih efektif dan tepat guna yang dapat meningkatkan keprofesionalitasan kinerja BUMDes yang berhilir kepada peningkatan kapasitas potensi desa untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat, mengingat BUMDes juga merupakan pilar perekonomian desa (Rafael et al., 2018). Berdasarkan dari hasil penelitian (Tini & Yuliastina, 2021) pengurus BUMDes memahami sistem administrasi BUMDes dan akuntansi/pembukuan serta memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan BUMDes berupa administrasi sederhana yaitu pembuatan buku kas harian, neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Sehingga bisa mendorong terwujudnya kemandirian Desa, Peningkatan Pendapatan Asli Desa, membuka peluang kerja tingkat Desa, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya bermuara ke pencapaian kesejahteraan masyarakat pada potensi unit-unit usaha yang sudah berjalan

Digitalisasi BUMDes merupakan langkah revitalisasi pemerintah dalam memasuki era normal baru. Digitalisasi BUMDes merupakan terobosan dalam meningkatkan program Alokasi Dana Desa baik dalam lingkup primer maupun sekunder. Digitalisasi BUMDes merupakan target jangka panjang pemerintah untuk melakukan percepatan menuju BUMDes digital sampai saat ini telah ada 28.000 BUMDes yang memasuki dunia digital. Untuk mempercepat digitalisasi, Kemdes PDTT telah menyediakan berbagai aplikasi digital yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh BUMDes secara gratis. Pemerintah juga memfasilitasi untuk melakukan diskusi, komunikasi, transformasi pengetahuan tentang Digitalisasi mulai dari teori, praktek, hingga simulasinya (Pratiwi & Novianty, 2020). Implikasi dalam pengelolaan keuangan secara digital memberikan efek yang sangat besar dalam pengorganisasian administrasi keuangan dan pengelolaan secara baik. Pengelolaan keuangan akan terukur dan secara otomatis lebih memudahkan kinerja organisasi BUMDes. Pengelolaan keuangan menjadi terpadu.

Beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang ditulis oleh Mardikanto (Fadlillah & Kushandajani, 2019) diantaranya; perbaikan pendapatan (*better income*) hal utama dari tujuan pemberdayaan adalah perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan. Perbaikan pendapatan diharapkan mampu dapat memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh atau pendapatan yang terbatas, perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik, perbaikan lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan oleh peraturan desa dan pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, perbaikan usaha, dan perbaikan masyarakat kehidupan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

### **PEMBAHASAN**

Peningkatan kapasitas Manajemen Sumber Daya manusia pada era digitalisasi memang perlu diupdate setiap waktu untuk menambah pengetahuan dalam menunjang kinerja pemerintah desa dalam mempermudah pengelolaan anggaran desa. Penyelenggaraan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Daerah Lampung Nomor 31 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan keuangan Desa adalah segala kegiatan yang meliputi penataan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pengumuman, dan tanggung jawab pembukuan Desa. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih bebas dalam menangani kewenangan publik dan berbagai aset yang dimiliki oleh Desa, termasuk pengelolaan dana Desa (Aji et al., 2020). Dengan disahkannya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 maka setiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kurang 1,4 Milyar per tahun. Ini



bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa dalam huruf d. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepulu perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan melihat pendapatan desa yang sangat besar, sudah seharusnya pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat (Mega, Daud Liando, 2017).

Menurut Munati (Maya Yusnita & Reko Dwi Salfutra, 2021) kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki. Kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Indikator kinerja pengelolaan keuangan desa terdiri dari (a) efisiensi, (b) efektifitas, (c) ekonomis, (d) pelaporan yang memadai (Budiati et al., 2020).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi (Rahmawati, 2019) perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015). Pasal 2 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan azas: (a) transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa; (b) akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan; (c) partisipatif yaitu dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa; (d) tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (e) disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Definisi inovasi tata kelola pemerintahan menurut Chhotray dan Stoker (Ramadhanny et al., 2018) adalah sebuah proses perubahan menuju tata kelola yang lebih baik dengan melibatkan banyak aktor didalam suatu organisasi masyarakat. Inovasi tata kelola pemerintahan ini mencakup empat elemen utama yaitu: inovasi rule atau aturan main, inovasi kolektivitas; inovasi di dalam membuat keputusan dan elemen inovasi.

## KESIMPULAN

Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam manajemen pengelolaan keuangan perlu diterapkan secara berkelanjutan dengan memberikan sosialisasi tentang aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan BUMDes, (a) peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia BUMDes dalam Pengelolaan Keuangan (b) merekrut dan memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan agar bisa bermanfaat dan efisiensi dalam penggunaan dana, (c) menambah anggaran untuk ke depannya. Untuk meningkatkan agar pelaksanaan Digitalisasi BUMDes, pemerintah menambahkan anggaran untuk keperluan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya program Digitalisasi BUMDes. Implikasi pengelolaan keuangan dengan digitalisasi akan memberikan langkah revitalisasi pemerintah dalam memasuki era normal baru. Digitalisasi BUMDes merupakan terobosan dalam meningkatkan program Alokasi Dana Desa.

## REFERENSI

Adella, L., & Rio, M. (2021). Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan : Studi pada masa pandemi Covid-19. *STIE Perbanas Press 2021, 11, 73–92*.  
<https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>



- Ajengtiyas, A., & Mashuri, S. (2020). Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Manual Menjadi Digitalisasi Akuntansi Sederhana Pada Pelaku UMKM Di Kabupaten Serang. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(1), 92–101.
- Aji, R., Lampung, K., Asnawi, N. F., Suhada, B., & Dacholfany, M. I. (2020). *Analysis of Village Financial Management Performance Using Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 73 of 2020 in Kecamatan Anak*. 267–281.
- Bergamaschi, M., Bettinelli, C., Lissana, E., & Picone, P. M. (2021). Past, ongoing, and future debate on the interplay between internationalization and digitalization. In *Journal of Management and Governance* (Vol. 25, Issue 4). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09544-8>
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Ely Triyo, Haryono, I. (2020). Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa ( Studi pada BUMDes Mandiri , Desa Morobakung , Kecamatan. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 14(56), 172–182. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353>
- Fadlillah, P. A., & Kushandajani. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 181–190.
- Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 220–234. <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1076>
- Giri, W. A. W., Julianto, P., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Efektifitas Sumber Daya Manusia , Modal Kerja Dan Efektifitas Biaya Operasional Terhadap Sisa Hasil Usaha BUMDES ( Studi Empiris Pada BUMDES Di Kecamatan Kubutambahan ). *Akuntansi*, 8(2).
- Harahap, firhan baihaqi, Junita, A., & Meutia, T. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi masyarakat dan perilaku kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa dengan komitmen pada tujuan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(110), 170–180.
- Harini, S., Pertiwi, S. R., & Rochman, N. (2015). Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan. *Media Pengabdian Kepada Masyarakat Qardhul Hasan*, 1(April), 49–65.
- Iryani, L., Mauliza, R., Studi, P., Bisnis, A., & Malikussaleh, U. (2020). *Gampong Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat merupakan sebuah desa dengan jumlah*. 1, 207–223.
- Lakoro, F. S., Bina, U., Gorontalo, M., Bina, U., & Gorontalo, M. (2021). *Literasi Dan Model Manajemen Keuangan Umkm Berbasis Digital Pada Umkm-Umkm Di Kabupaten*. 5(2).
- Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 1(2), 27–36.
- Maya Yusnita, & Reko Dwi Salfutra. (2021). Mengukur Kinerja Pengeolaan Dana Desa Berbasis Kompetensi Melalui Partisipasi Sebagai Variabel Moderasi. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 12(2), 278–286. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.012.2.05>
- Mega, Daud Liando, J. K. (2017). Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 2–12.
- Miftah, M., & Febri Sukmawati. (2020). Digitalisasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dengan Metode Accrual Basis Pada Klinik As Shifa Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 47–62. <https://doi.org/10.51903/kompak.v13i1.156>
- Pramudia, W., Susila, G. P. A. J., & Bagia, I. W. (2016). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1).
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Purnama, H. (2022). Peranan Csr Dalam Memediasi Pengaruh Digitalisasi, Keputusan Investasi

- Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi di BEI Periode 2016-2020). *Medikonis*, 13(1), 29–40. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v13i1.52>
- Rafael, U. G., Posumah, J. H., & Plangiten, N. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Guaan Kecamatan Moat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50), 1–8.
- Rahmawati. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. *Urnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.xxx>
- Ramadhanny, R. K., . T. Y., & manar, dzunuanus ghulam. (2018). Inovasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa : Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting) untuk Menciptakan Good Governance di Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3), 291–230. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21151>
- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, H., Syaparuddin, S., & Emilia, E. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30>
- Rifai, A. A., Ak, M. M., & Kunci, K. (2020). Kualitas Kinerja Organisasi Untuk Mencapai Target. *Jurnal Ekonomedia*, 09(01), 101–112.
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Berdikari Melalui Implementasi Digital Marketing System. *Carrade : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–75. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde%0Ahttps://doi.org/10.31960/caradde.v3i2.467>
- Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 488–507. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art15>
- Sumiyati, Y., & Ichi, I. (2019). Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa Dan Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 89. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.372>
- Terbuka, U. (2020). *Tugas Akhir Progr Am Magis Ter ( Tapm ) Stra Teg I Penge Mbang An Sume R Day A Manus Ia Dalam Penge Lolaa N Badan Usaha Milik Desa T APM diajuka n sebagai salah satu syarat untuk memper oleh Gelar Magiste r Manaje men Disusun Oleh : FAKHR I ABDUL LATIEF.*
- Tini, D. L. R., & Yuliastina, R. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Administasi Bumdes Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.22219/janayu.v2i1.13044>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Wildanu, E. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 58–66. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1458>
- Zuhri, N., Dian Prihardini Wibawa, Yanuar, S. D., & Christianingrum. (2007). Pengembangan BUMDes Berbasis SIMSerta Penguatan Perekonomian melalui Pendampingan Pembuatan Produk Kuliner bagi IBUPKK. *IKRAITH-ABDIMAS No*, 4(3), 6.

